

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penyajian data dan hasil analisa yang ditemukan dilapangan tentang Fenomena Perempuan Pesantren Salafiyah Shafiyah Sukorejo dalam Sosialisasi Politik Pilkada di Kabupaten Situbondo tahun 2015, maka secara signifikan peneliti memberikan benang merah bahwa:

1. Peran perempuan diranah publik memiliki legitimasi yang sangat kuat didalam Islam, teologis, filosofis maupun secara kultural. Secara struktural sepanjang sejarah NU memang tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan tetapi secara kultural perempuan dilindungi pondok pesantren memiliki peluang yang sangat besar untuk berpartisipasi diruang publik bahkan menjadi pemimpin ditingkat nasional.

Peran perempuan Pesantren Salafiyah Shafiyah Sukorejo pada pemilihan Umum Bupati Situbondo tahun 2015 selain sebagai pengurus pondok pesantren ternyata juga ikut andil dalam pesta demokrasi. Keikutsertaan mereka bukan untuk mencalonkan sebagai kepala daerah tapi hanya untuk membantu memajukan pembangunan negara. Selain itu, keterlibatan para perempuan dalam politik khususnya dalam politik

praktis hanya untuk menjadikan partai politik sebagai wasilah untuk mensyiarkan agama Islam.

Meskipun saat ini banyak pandangan miring tentang partisipasi perempuan dalam kursi politik tapi mereka para perempuan menyadari akan pentingnya politik sehingga para perempuan dari lingkup pesantren juga berusaha mengembalikan persepsi buruk masyarakat tentang kedudukan perempuan dalam politik. Karena para perempuan juga merupakan mahluk tuhan yang diberi hak untuk tetap berpartisipasi dalam dunia publik bukan hanya dalam dunia domestik *Macak, Masak dan Manak*. Sehingga politik bagi perempuan merupakan hal yang wajar-wajar saja apalagi dalam agama itu tidak pernah menjadi masalah selama masih bisa membagi tugas antara tugas rumah dan tugas negara.

Lain dari hal itu, terpilihnya perempuan dari kalangan pesantren dalam dunia politik praktis merupakan sesuatu yang wajib diacungi jempol karena di era saat ini kuota perempuan diparlemen disediakan 30% untuk perempuan itu artinya bahwa perempuan juga boleh menduduki jabatan krusial di dunia politik praktis yang oleh sebagian orang dunia politik dianggap sebagai dunianya para kaum maskulin, dunia yang sangat berat jika perempuan masuk didalamnya. Padahal jika di rasionalisasikan perempuan juga bisa melakukan layaknya aktivitas laki- laki bahkan bisa sejajar dengan laki-laki tanpa

masyarakat sekitar. Karena keikutsertaan perempuan dalam politik tidak serta merta karena atas dasar kemauan sendiri melainkan juga karena dorongan dari masyarakat. Sosialisasi politik yang dilakukan dimulai dari masyarakat hingga pada santriwati pondok pesantren Salafiyah Shafiyah Sukorejo.

Sosialisasi politik yang dilakukan beragam macamnya mulai dari *door to door* hingga pada diskusi yang bersifat formal tergantung pada karakteristik masyarakatnya. Sehingga dengan melihat karakteristik masyarakatnya, para aktor politik secara mudah memberikan pemahaman, memberikan informasi kepada masyarakat dan juga kepada santriwati yang akan menjadi pewaris atau generasi selanjutnya.

Secara khusus, Sosialisasi yang diberikan kepada santriwati dilingkungan pondok tidak melulu berupa ceramah panjang, penggemblengan setiap hari setiap malam atau pengajian rutin disetiap malam akan tetapi lebih pada diskusi yang sifatnya informal. Sehingga perempuan politik yang merangkap jabatan sebagai pengasuh hanya memanggil beberapa santriwati untuk diberi pemahaman selanjutnya santriwati tersebut mentransferkan ilmu yang didapat kepada santriwati yang lain. Dalam hal ini para kader politik perempuan menggunakan agen partai politik untuk proses sosialisasi dengan masyarakat sekitar dan menggunakan teman sebaya untuk proses sosialisasi dengan para santriwati di lingkungan asrama. Dengan cara

yang demikian tidak akan menghambat jalannya proses belajar mengajar dipondok pesantren. Karena selain belajar ilmu agama mereka juga bisa belajar ilmu umum khususnya politik.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapatlah dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya kajian mendalam tentang keterlibatan perempuan dalam politik apalagi perempuan dari lingkup pondok pesantren.
2. Keterlibatan aktor politik perempuan dari lingkup pondok pesantren merupakan terobosan yang wajib diacungi jempol. Karena meskipun berasal dari pondok pesantren ternyata perempuan pondok pesantren juga mampu melakukan aktivitas yang dilakukan oleh kebanyakan laki- laki itu. Meskipun banyak pandangan miring tentang kiprah perempuan dalam politik tapi itu jangan dijadikan hambatan untu tetap mensyiarkan agama Islam. Apalagi saat ini negara kita butuh sosok pemimpin perempuan dari latar belakang pesantren. Tetaplah berkiprah perempuan- perempuan hebat semangat kalian akan selalu menjadi tonggak kemajuan negara ini.
3. Sebagai warga negara yang baik, setidaknya santirwati ataupun masyarakat sekitar pondok pesantren tetap jangan mau dijadikan orang nomer dua atau konco wingkeng karena sebagai elemen dari warga negara maka partisipasi perempuan juga wajib hukumnya diakui.

Karena dihadapan tuhan antara laki- laki dan perempuan tidak ada perbedaan.

4. Bagi pemerintah setidaknya diskriminasi perempuan dalam politik dihapuskan karena saat ini perempuan juga ingin berkiprah didunia publik bukan hanya didunia domestik saja. Perempuan juga punya hak untuk berpartisipasi dalam suatu proses kebijakan publik.

